

DUGAAN KORUPSI 40 MILYAR DALAM PROYEK PEMILU 2004 DI RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI)

I. Pendahuluan

Perubahan status Radio Republik Indonesia dari *government owner* menjadi *public owner* seharusnya mendorong instansi ini menjadi akuntabel dan transparan kepada masyarakat. Namun sayangnya, pola manajemen terpusat terutama disektor pengadaan barang justru menjerumuskan RRI ke dalam tata pengelolaan institusi yang diduga sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Seperti diketahui, Panitia Anggaran Komisi I DPR RI pada tanggal 17 Oktober 2003 telah menyetujui pengajuan dana tambahan bagi RRI dalam rangka sosialisasi Pemilu 2004. Dana yang bersumber dari anggaran belanja tambahan (ABT) dengan jumlah total 55 milyar rupiah tersebut sedianya akan digunakan dengan rincian sebagai berikut :

1. Untuk kegiatan proyek pemilu I sebesar Rp 27.705.000.000,00 (Dua puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk membeli peralatan teknik pemancar dan sarana prasarana lainnya.
2. Untuk kegiatan proyek pemilu II sebesar Rp. 27.295.000.000,00 (Dua puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan bagi pembiayaan operasional dan peralatan sebagai penunjang kegiatan pemilu 2004.

Untuk kegiatan proyek Pemilu I, Indonesia Corruption Watch (ICW) telah menemukan dugaan korupsi dengan modus mark-up dalam pembelian beberapa pemancar yang diperuntukkan RRI cabang Merauke, Makassar, Lampung, Bengkulu, G. sitoli, Toli-toli dan Sintang. Nilai mark-upnya sendiri sangat fantastis yaitu sebesar Rp. 20.669.538.795,00 (Dua puluh milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah atau mencapai 74,6% dari total yang dialokasikan.¹

Sedangkan untuk kegiatan proyek pemilu II, setelah kami telusuri dan analisa ternyata nasibnya tidak jauh berbeda dengan pemilu I. Banyak terjadi penyimpangan dalam proses pembelian (tender) dan kecenderungan mark-up harga dari beberapa peralatan yang dibeli oleh RRI.

¹ Temuan dugaan mark-up Proyek Pemilu I *direlease* tanggal 6 Mei 2004.

II. Indikasi Penyimpangan dalam proyek pemilu II

Misi RRI untuk menyukseskan Pemilu 2004 seharusnya patut mendapat penghargaan. Namun, belajar dari dugaan korupsi dalam pengadaan peralatan pendukung untuk proyek Pemilu I sepertinya pesta demokrasi (pemilu) diduga hanya dijadikan komoditas. Apalagi modus penyimpangan pada proyek pemilu II pun ternyata tidak jauh berbeda dengan penyimpangan dari proyek sebelumnya. Indikasi penggelembungan anggaran merupakan cerminan bagaimana sebenarnya manajemen di tubuh RRI.

A. Dugaan Mark Up Proyek Pemilu II

Proyek pemilu II bisa dikatakan sebagai wujud keseriusan RRI dalam mensosialisasikan segala macam informasi yang berkaitan dengan pemilu 2004. Proyek ini sengaja dipersiapkan untuk menunjang kegiatan proyek pemilu sebelumnya atau jika dilihat dari peralatan yang dibeli, proyek ini merupakan paket antisipatif jika beberapa peralatan yang dibeli sebelumnya mengalami masalah.

Menurut surat keputusan Menteri Keuangan No. 874/KM.3-43/SKOR/2003 pada tanggal 30 September 2003 tentang otorisasi anggaran bagi RRI yang kemudian diperbaiki dengan surat No S-5184/A/2003 dan ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Anggaran II Departemen Keuangan Washington II. Sinaga, RRI kemudian mendapat otorisasi keuangan sebesar Rp. 27.295.000.000,00 (Dua puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) antara lain untuk:

- a. Pengadaan program RRI untuk cabang utama, madya, muda, SLN dan pusdiklat sebanyak 36 paket senilai Rp 2.590.000,00.
- b. Pengadaan peralatan Ban Ob Van 60 buah senilai Rp 196.647.000,00.
- c. STL 5 set senilai Rp 1.250.000.000,00.
- d. Down Link (Sound receiver only) 2 set senilai Rp 1.023.916.000,00.
- e. Digital recorder 60 buah senilai Rp 120.000.000,00.
- f. Telepon satelit 60 unit Rp 358.500.000,00.
- g. Server jaringan Audio dan tes 2 buah senilai Rp 500.000.000,00.
- h. Spare part pemancar 1 paket senilai Rp 13.830.937.000,00.
- i. Computerized Pemancar 1 paket Rp 7.425.000.000,00.

Hampir serupa dengan proyek pemilu I, setelah ICW telusuri proyek Pemilu II, nilai harga peralatan yang disebutkan panitia proyek RRI diatas ternyata menunjukkan perbedaan yang sangat tinggi dengan harga hasil temuan ICW.

Dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 27.295.000.000,00 (Dua puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan program dan peralatan untuk proyek Pemilu II ternyata setelah dilakukan pengecekan hanya menghabiskan dana sebesar Rp. 6.174.620.705,00 (Enam milyar seratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima rupiah).

Ambil contoh misalnya pembelian down-link (sound receiver only) sebanyak 2 set yang dianggarkan RRI senilai Rp 1.023.916.000,00. Padahal harga down-link dengan kualitas tinggi seperti yang digunakan radio BBC dengan merk Scientific Atlanta hanya senilai US\$ 500 atau setara dengan Rp 4.250.000,00 (dengan kurs US\$ 1 = Rp 8.500,00). Sementara untuk down-link dengan kualitas biasa seperti yang digunakan oleh salah satu radio swasta di Jakarta hanya seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Demikian halnya dengan paket computerized pemancar yang dianggarkan RRI senilai Rp 7.425.000.000,00.² Dari data yang kami miliki, total harga computerized pemancar dengan asumsi digunakan untuk 5 stasiun radio RRI sebagaimana yang tertera dalam proposal RRI kepada Panitia Anggaran Komisi I DPR RI adalah Rp 199.707.500,00.

Dengan demikian, terdapat indikasi *mark up* harga sebesar 77,4 % dari total dana yang dialokasikan atau sekitar Rp. 21.120.379.295,00 (Dua puluh satu milyar seratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah. (lihat tabel 1).

Jika seluruh dugaan mark-up pengadaan peralatan siaran untuk proyek pemilu I dan pemilu II ditotal, maka nilai mark-upnya mencapai Rp. 41.789.918.090,00 (Empat puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu sembilan puluh rupiah). Artinya 75% dana yang dialokasikan bagi RRI untuk menyukseskan pemilu 2004 diduga di mark-up.

B. Penentuan Mitra Kerja (rekanan) yang bermasalah.

Sistem pengadaan barang di RRI yang tidak transparan memang sangat rawan dengan nuansa KKN. Selain memunculkan monopoli harga barang juga

² Menurut salah seorang praktisi penyiaran, istilah computerized pemancar sendiri tidak dikenal. Yang lebih populer digunakan adalah digitally pemancar.

memperlemah partisipasi cabang-cabang RRI dalam mengawasi kinerja manajemen ditingkat pusat.

Tersentralisasinya pengadaan barang ini mengakibatkan manajemen ditingkat pusat leluasa memilih mitra-mitra kerja tanpa perlu melakukan *public accountability* terhadap daerah. Seperti dikatakan Kepala Stasiun RRI Purwokerto, Andar Kusnadi, menyatakan bahwa semua pengadaan barang selalu ditangani RRI pusat, daerah tidak pernah diminta pertimbangan soal harga, kualitas, dan bentuk alat yang akan dikirim.³

Dugaan mark-up pengadaan alat siaran di RRI tentunya telah merugikan keuangan negara karena ketidakefisienannya dan rentan terhadap praktek KKN. Dalam kasus ini diduga manajemen RRI tidak menggunakan supplier umum yang benar-benar memiliki kapasitas dalam memasok peralatan siaran. Alhasil, beberapa pemenang maupun peserta tender bahkan tidak terdaftar dalam asosiasi Kamar Dagang Indonesia (Kadin) seperti yang diwajibkan berdasarkan Keppres No 18 tahun 2000 pasal 9 ayat 1a tentang kualifikasi penyedia barang dan jasa.⁴

Tabel 2 : Daftar Pemenang dan peserta tender yang diduga ikut serta dalam proyek pengadaan peralatan siaran RRI selama tahun 2003.

No	Nama proyek	Peserta Tender	Spesifikasi Usaha
1.	Proyek Pemilu I : Pengadaan Pemancar dan STL	PT Bunga Lestari (Pemenang Tender)	Suku cadang kendaraan bermotor, pengujian, kereta api, peawat terbang, kapal laut, radio, telekomunikasi dan elektornika
		PT Lian Surya*	-
		PT Harumas Putra Mandiri	Suku cadang mekanik, listrik, alat komputer, kendaraan motor, perabot rumah tangga
		PT Pelangi Utama Jaya*	-
		PT Pangu Arthadipta	(Pertanian, ternak perikanan)
		PT Luker Tina	Radio, telekomunikasi, teknologi informasi, komputer, mekanikal dan listrik
2	Proyek Pemilu I : Pengadaan Up	PT Paro Rejeki (Pemenang tender)	Pertanian, Perikanan dan peternakan

³ Majalah Tempo, No. 12/XXXIII/17 - 23 Mei 2004

⁴ Keppres no 18 tahun 2000 tentang pedoman pengadaan barang/jasa instansi pemerintah

Press Release 31 Mei 2004
No: 6/PR/ICW/V/2004
Indonesia Corruption Watch

	Link dan World Space	PT Astrasea Pasirindo	Mekanikal, listrik, komputer, ukur, survei, laboratorium, timbangan khusus, radio, telekomunikasi
		PT Echozorro*	-
		PT Toras Jaya Harapan	Mekanikal, listrik, komputer, ukur, survei, laboratorium, timbangan khusus, radio, telekomunikasi, penyewaan angkutan laut dan udara
3	Proyek Pengadaan Alat/Peralatan pemancar	PT Balimatraman permai (Pemenang Tender)*	-
		PT Kolam Intan Permai*	-
		PT Mangkubuana Utama Jaya	Alat teknik pendidikan, peragaan, visualisasi, peragaan kesenian, perabot rumah tangga, furniture, kerajinan, banhan bangunan, logam, generator.
		PT Titon Marina	Mekanikal, listrik, komputer, ukur, survei, laboratorium, timbangan khusus, radio, telekomunikasi, Kontruksi
		PT Angrilam Simta Mandiri	Mekanikal, listrik, komputer, ukur, survei, laboratorium, timbangan khusus, radio, telekomunikasi, penyewaan angkutan laut dan udara
		PT Suryantara Purna Wibawa*	-
		PT Arinda Raksa Teguh	Mekanikal, listrik, komputer, ukur, survei, laboratorium, timbangan khusus, radio, telekomunikasi, penyewaan angkutan laut dan udara
	Proyek Pemilu II : Perlatan server jaringan audio & teks, Spare part pemancar dan Computerized pemancar	PT Charmarista Gita Jaya (Pemenang Tender)*	-
		PT Toras Jaya Harapan*	Mekanikal, listrik, komputer, ukur, survei, laboratorium, timbangan khusus, radio, telekomunikasi, penyewaan angkutan laut dan udara
		PT Talenta Ria Lestari*	

		PT Pharmakasih Sentosa*	-
		PT Toraya Indah*	-
		PT. Betina Agung*	-
		PT. Angrilam Simta Mandiri	Suku cadang kantor, pergudangan, alat teknik pendidikan, visualisasi, olahraga, kesenian, perbot rumah tangga, furniture, kerajinan, radio, telekomunikasi dan elektronika.
		PT. Sari Tiodo	Suku cadang mekanikal, listrik, alat berat, kendaraan bermotor dan pengujian kereta api, pesawat terbang, kapal laut, suku cadang konstruksi, kompresor, generator, bahan bangunan dan logam.

*) Tidak terdaftar di Kamar Dagang Indonesia

C. Analisa Kasus

Jika diteliti lebih jauh perusahaan-perusahaan yang diduga ikut dalam tender di RRI ternyata beberapa bermasalah, misalnya saja *PT Charmarista Gita Jaya*. Perusahaan pemenang tender pengadaan beberapa peralatan siaran untuk proyek pemilu II ini ternyata tidak terdaftar dalam kamar dagang Indonesia (Kadin)⁵, serupa dengan PT Balimatraman yang menang tender dalam proyek pengadaan suku cadang di wilayah Cimanggis.

Selain itu terdapat pula perusahaan yang cakupan usaha yang sangat umum bahkan ada yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan pengadaan alat siaran seperti *PT Paro Rejeki* dan *PT Panggu Arthadipta* yang bergerak dibidang Pertanian, Perikanan dan peternakan.

Penggunaan mitra koneksi sepertinya sudah biasa dilakukan dalam setiap pengadaan barang di RRI. Seperti hasil audit BPK tahun 2003, dijelaskan dalam salah satu temuannya, bahwa untuk pembelian beberapa buah kendaraan operasional seperti Opel Blazer ternyata RRI harus membeli lewat rekanan (pihak ketiga), bukan langsung kepada dealer resmi. Artinya jelas RRI sering menggunakan pola kerja yang tidak efektif dan efisien.

⁵ Sumber [www. Kadin.or.id](http://www.Kadin.or.id)

Menariknya, masih menurut hasil audit BPK tahun 2003, terhitung akhir Nopember 2003, RRI ternyata belum menyerahkan laporan kinerja perusahaannya, perkembangan jumlah laba-rugi dan kewajiban kepada negara sejak tahun 2001 sehingga statusnya kinerjanya tidak jelas, apakah masuk kategori sehat atau tidak.⁶

Laporan Audit BPK tersebut jelas menimbulkan pertanyaan besar dan seharusnya menjadi pertimbangan bagi Dewan Pengawas, Dirjen Anggaran Departemen Keuangan maupun Panitia anggaran Komisi I DPR dalam merencanakan dan menyetujui setiap pengajuan RRI.

Khusus bagi Panitia Anggaran Komisi I DPR RI jelas telah melakukan kelalaian dalam menjalankan fungsi pengawasannya sehingga dengan mudah menyetujui proposal pengajuan RRI. Seharusnya DPR RI melakukan tindakan preventif dalam setiap persetujuan yang menyangkut penggunaan anggaran negara. Apalagi jika sejak dalam perencanaan, jumlah anggaran yang diajukan terasa sangat fantastis untuk ukuran yang wajar. Jikapun kemampuan teknis untuk kualifikasi tertentu tidak dimiliki –seperti dalam kasus pengajuan alat siaran– Panitia Anggaran dapat mengundang konsultan independen (*expertised*) yang kapabel untuk menilai proposal sehingga kemungkinan bobolnya uang negara bisa dicegah.

Tentunya kasus RRI ini perlu ditangani oleh semua pihak baik DPR RRI, Departemen Keuangan, BPK maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara serius mengingat dugaan korupsi yang sedemikian besar. Keberhasilan penanganan kasus terutama dari KPK secara cepat, adalah harapan baru bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Rekomendasi

1. Menuntut KPK untuk segera menyelesaikan dugaan *mark-up* dengan memanggil para Dirut RRI terkait untuk menjelaskan secara transparan semua proses pengadaan barang.
2. Menuntut BPK bersama Auditor Independen untuk segera menyelesaikan tugasnya memeriksa kinerja dan keuangan RRI.

⁶ Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan semester II tahun anggaran 2003, Buku II BPK Februari 2004

Lampiran

Tabel 1 : Perbandingan Harga pengadaan barang untuk proyek Pemilu II

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan Versi RRI	Total Harga Versi RRI	Harga Satuan Pasaran	Total Harga Pasaran
1.	Pengadaan program RRI : Cabang Utama, Madya, Muda, SLN dan Pusdiklat	36 Paket	-	Rp. 2.590.000.000,00	-	Rp. 2.590.000.000,00
2.	Ban OB Van	60 Buah	Rp. 3.277.450,00	Rp. 196.647.000,00	Rp. 3.277.450,00	Rp. 196.647.000,00
3.	STL	5 Set	Rp. 250.000.000,00	Rp. 1.250.000.000,00	Rp. 72.000.000,00	Rp. 360.000.000,00
4.	Down Link (Sound receiver Only)	2 Set	Rp. 511.958.000,00	Rp. 1.023.916.000,00	U\$. 500 / Rp. 4.250.000,00	Rp. 8.500.000,00
5.	Digital Recorder	60 Buah	Rp. 2000.000,00	Rp. 120.000.000,00	Rp. 1.100.000,00	Rp. 66.000.000,00
6.	Telepon Satelit	60 Unit	Rp. 5.975.000,00	Rp. 358.500.000,00	Rp. 5.000.000,00	Rp. 300.000.000,00
7.	Server jaringan Audio & teks	2 Buah	Rp. 250.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	U\$. 5.425 / Rp. 46. 112.500,00	Rp. 92.225.000,00
8.	Spare part pemancar	1 paket	Rp. 13.830.937.000,00	Rp. 13. 830.937.000,00	Jumlah dari harga 5 Pemancar yang dibeli pada pemilu I	Rp. 2.361.541.205,00
9.	Computerized pemancar	1 Paket	Rp. 7.425.000.000,00	Rp. 7.425.000.000,00	U\$. 4.699/ Rp. 39.941.500,00	Rp. 199.707.500,00
	Total Harga			Rp.27.295.000.000,00		Rp. 6.174.620.705,00
	Selisih Harga (Mark Up)				Rp. 21.120.379.295,00	

* 1 dollar = Rp. 8.500,00

Tabel 2 : Total Dugaan Mark Up Proyek Pemilu I dan Pemilu II

No.	Nama proyek	Jenis Pengadaan	Nilai Mark Up
1.	Proyek Pemilu I	Pembelian pemancar untuk beberapa wilayah diantaranya Bengkulu, Lampung, Merauke, Makassar	Rp. 20.669.538.795,00
2.	Proyek Pemilu II	Pembelian spare part pemancar, computerized pemancar, server jaringan Audio, Down Link dan pengadaan program untuk cabang utama, madya, SLN dan pusdikalat	Rp. 21.120.379.295,00
	Total Mark Up		Rp. 41.789.918.090,00